RENCANA AKSI KINERJA
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS TAHUN 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			I	II	III	IV
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	85%	85%	85%	85%
		b. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	90%	90%	90%	90%
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%	90%	90%	90%
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	85%	85%	85%	85%
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	80%	80%	80%	80%
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	60%	60%	60%	60%
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	5%	5%	5%	5%
		h. Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5%	5%	5%	5%
		i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5%	5%	5%	5%

		j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan eCourt	80%	80%	80%	80%
		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu)	100%	100%	100%	100%
		l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (eBerpadu)	100%	100%	100%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	Menyelesaikan perkara dengan jangka waktu Kurang dari 5 bulan	√	√	√	√	Terselesainya perkara tepat waktu	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	602.340.000
2	Menginput Amar Putusan dan Tanggal Putusan di SIPP maksimal 1 hari setelah Sidang Putusan	√	√	√	√	Data Putusan di SIPP	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	602.340.000
3	Mencatat tanggal penerimaan putusan tersebut dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan buku register terkait.	√	√	√	√	Buku Register	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	602.340.000
4	Mengunggah Salinan Putusan ke SIPP (e-doc)	√	√	√	√	e-doc Salinan Putusan	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	602.340.000
5	Melakukan *upload* file putusan	√	√	√	√	Putusan	Program	Peningkatan	602.340.000

	yang telah dianonimisasi ke dalam aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)					anonimisasi	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Manajemen Peradilan Umum	
6	Pelaksanaan eksekusi dengan melibatkan pihakpihak terkait	√	√	√	√	Terlaksanaan ya Kegiatan Eksekusi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	602.340.000
7	Hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restoratif	√	√	√	√	Putusan yang mencantumkan penyelesaian dengan restoratif justice	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	602.340.000
8	Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan akta perdamaian	√	√	√	√	Penerbitan Akta damai yang ditanda tangani oleh Ketua PN	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	602.340.000
9	Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan penetapan diversi	√	√	√	√	Penetapan Diversi oleh Ketua Pengadilan Negeri	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	602.340.000
10	Memantau jumlah perkara	√	√	√	√	Perkara	Program Peningkatan	Peningkatan Manajemen	602.340.000

	perdata yang masuk melalui e-Court secara berkala					perdata yang masuk	Manajemen Peradilan Umum	Peradilan Umum	
11	Pemberitahuan jadwal sidang dan panggilan kepada para pihak (terdakwa/penasihat hukum, jaksa, penyidik) melalui sistem elektronik.	√	√	√	√	jadwal sidang	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	602.340.000
12	Menerbitkan surat penetapan izin (geledah/sita/perpanjangan penahanan) secara elektronik.	√	√	√	√	Surat Penetapan Izin (geledah/sita/ perpanjangan penahanan)	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	602.340.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			I	II	III	IV
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	4	4	4	4

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	Melakukan survei kepuasaan masyarakat	√	√	√	√	Tersedianya data indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	602.340.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			I	II	III	IV
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	80	80	80
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	90	90	90	90
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	90	90	90	90
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	80	80	80	80
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	80	80	80	80
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.0	3.0	3.0	3.0

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.	Mengumpulkan data lengkap terkait setiap ASN di pengadilan	√	√	√	√	Data ASN	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	35.450.400.000

2.	Melakukan pencatatan seluruh data perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa pada aplikasi yang terintegrasi (Sakti/Omspan)	√	√	√	√	Laporan data pada aplikasi (Sakti/ Omspan)	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	35.450.400.000
3.	Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan dan triwulanan pada halaman III DIPA secara realistis dan konsisten dengan jadwal pelaksanaan kegiatan	√	√	√	√	Rencana Penarikan Dana (RPD)	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	35.450.400.000
4.	Melakukan pencocokan data BMN secara rutin setiap bulan (atau periode yang ditetapkan)	√	√	√	√	Data BMN	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	35.450.400.000

Palembang, Januari 2026
KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS



Dr. I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H.
NIP. 197012201996031002